

# BAB I

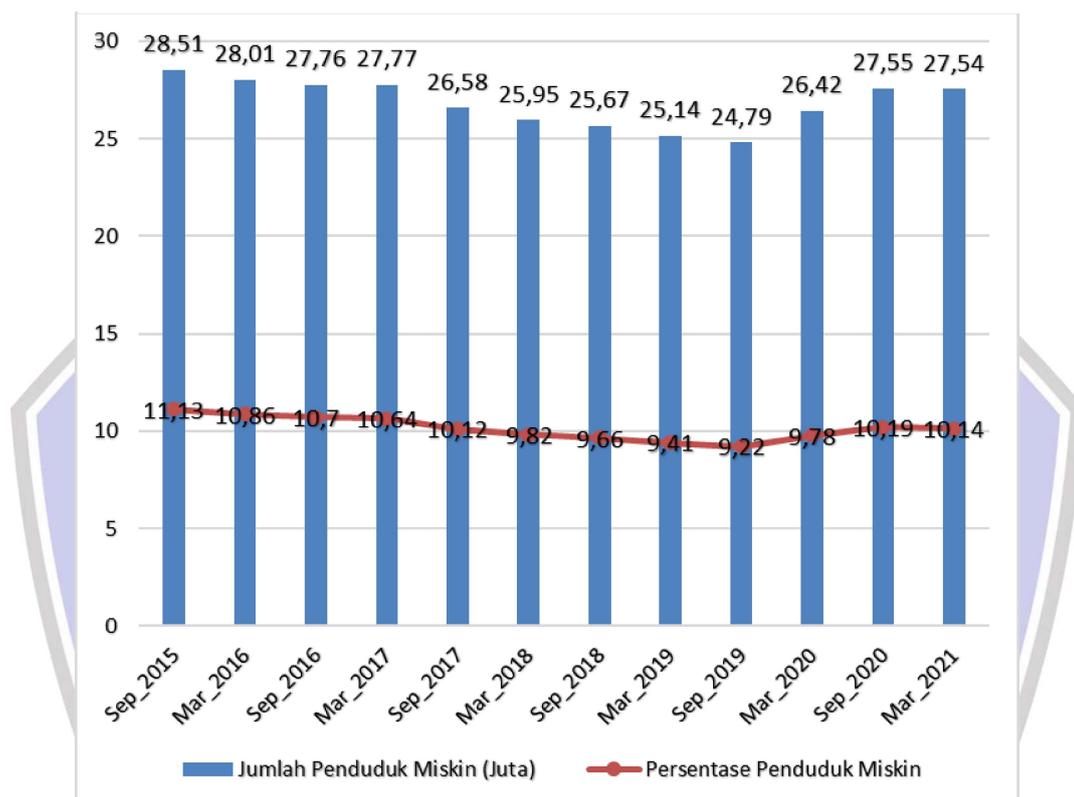
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum bangsa Indonesia masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor dan dapat digolongkan menjadi dua hal, yang pertama adalah faktor alamiah, yaitu keadaan lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, serta adanya bencana alam dan yang lainnya. Penyebab kedua adalah faktor non alamiah, yaitu kemiskinan yang diakibatkan dari kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, keadaan politik yang tidak stabil, serta kesalahan pengelolaan sumber daya alam (Iskandar<sup>1</sup>, Hartoyo<sup>2</sup>, Ujang Sumarwan<sup>2</sup>, 2018). Kemiskinan juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa yang sedang berkembang di seluruh dunia. Menurut (Levitan) dalam (Maqasid & Ah, 1945) kemiskinan adalah kurang terpenuhinya kebutuhan hidup dan pelayanan publik yang dibutuhkan untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Menurut (Schiller) dalam (Maqasid & Ah, 1945) kemiskinan yakni ketidakmampuan seorang untuk memperoleh barang dan pelayanan publik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemiskinan ialah kondisi penduduk ataupun sebagian penduduk yang hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan dan papan yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan tingkatan kehidupan yang terbatas. Menurut (Levitan 1980) dalam (Suyanto, 2001) mendefinisikan kemiskinan adalah belum tercukupinya

pelayanan-pelayanan sosial dan kebutuhan barang untuk mencapai standar kehidupan yang layak.

**Gambar 1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015–Maret 2021**



Sumber : BPS. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021



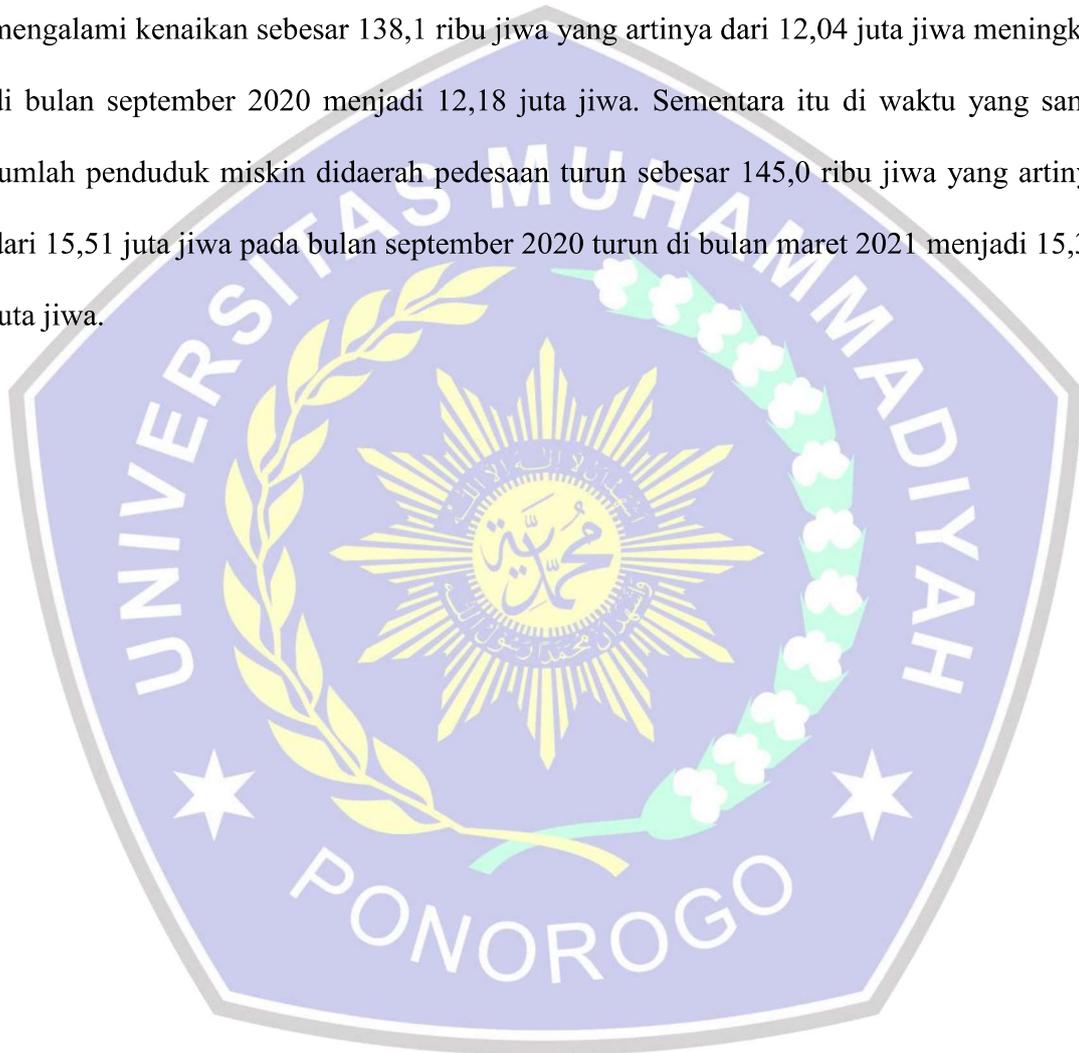
**Tabel 1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Penduduk Miskin Menurut Daerah  
Maret 2020–Maret 2021**

<b>Daerah/Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2020	11,16	7,38
September 2020	12,04	7,88
Maret 2021	12,18	7,89
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2020	15,26	12,82
September 2020	15,51	13,20
Maret 2021	15,37	13,10
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>		
Maret 2020	26,42	9,78
September 2020	27,55	10,19
Maret 2021	27,54	10,14

*Sumber : BPS. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021*

Berdasarkan data dari gambar 1 tentang profil kemiskinan di Indonesia Maret 2021 (BPS, 2021) pada bulan maret 2020 mengalami peningkatan dari bulan september 2019 sebesar 0,56% dan bertambah lagi di bulan september 2020 sebesar 0,41% menjadi 10,19% dan pada bulan maret 2021 turun 0,05% menjadi 10,14%. Jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2021 sebesar 27,54 juta jiwa, mengalami penurunan sebesar 0,01 juta jiwa terhadap bulan september 2020 dan meningkat 1,12 juta jiwa terhadap bulan maret 2020. Penambahan jumlah penduduk miskin tersebut didominasi pada daerah perkotaan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan

september 2020 mencapai 7,88% naik menjadi 7,89% pada bulan maret 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan september 2020 mencapai 13,20% turun pada bulan maret 2021 adalah 13,10%. Dibanding bulan september 2020, jumlah penduduk miskin bulan maret 2021 di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 138,1 ribu jiwa yang artinya dari 12,04 juta jiwa meningkat di bulan september 2020 menjadi 12,18 juta jiwa. Sementara itu di waktu yang sama jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan turun sebesar 145,0 ribu jiwa yang artinya dari 15,51 juta jiwa pada bulan september 2020 turun di bulan maret 2021 menjadi 15,37 juta jiwa.



**Tabel 2 Garis Kemiskinan Dan Perkembangannya Menurut Daerah Maret 2020–  
Maret 2021**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>			
Maret 2020	339.519	132.303	471.882
September 2020	342.356	133.121	475.477
Maret 2021	353.767	136.081	489.848
Perubahan Mar'20–Mar'21(%)	4,20	2,86	3,82
Perubahan Sep'20–Mar'21(%)	3,33	2,22	3,02
<b>Perdesaan</b>			
Maret 2020	331.492	101.788	433.281
September 2020	335.042	102.860	437.902
Maret 2021	344.277	105.908	450.185
Perubahan Mar'20–Mar'21(%)	3,86	4,05	3,90
Perubahan Sep'20–Mar'21(%)	2,76	2,96	2,80
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>			
Maret 2020	335.793	118.859	454.652
September 2020	339.004	119.943	458.947
Maret 2021	349.474	123.051	472.525
Perubahan Mar'20–Mar'21(%)	4,07	3,53	3,93
Perubahan Sep'20–Mar'21(%)	3,09	2,59	2,96

Sumber : BPS. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa pada bulan maret 2020 Indonesia memiliki garis kemiskinan pada daerah perkotaan sebesar Rp471.882,00,-/kapita/bulan dengan rincian pada garis kemiskinan makan sebesar Rp339.519,00,-/kapita/bulan dan garis kemiskinan bukan makan sebesar Rp132.303,00,-/kapita/bulan, angka tersebut

lebih tinggi dari garis kemiskinan di daerah pedesaan pada bulan yang sama yaitu Rp433.281,00,-/kapita/bulan dengan rincian garis kemiskinan makan sebesar Rp331.492,00,-/kapita/bulan dan garis kemiskinan bukan makan Rp101.788,00,-/kapita/bulan, jumlah dari garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan tersebut sebesar Rp454.652,00,-/kapita/bulan dengan rincian adalah garis kemiskinan makan sebesar Rp335.793,00,- atau 73,86% dari total garis kemiskinan pada bulan maret 2020 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp118.859,00,- atau 26,14% dari total garis kemiskinan pada bulan maret 2020. Pada bulan september 2020 angka garis kemiskinan tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,04% yaitu Rp454.947,00,-/kapita/bulan dengan rincian adalah garis kemiskinan makan sebesar Rp339.004,00,- atau 73,87% dari total garis kemiskinan pada bulan september 2020 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp119.943,00,- atau 26,13% dari total garis kemiskinan pada bulan september 2020, dan pada bulan maret 2021 angka garis kemiskinan tersebut mengalami kenaikan kembali sebesar 2,87% dari bulan september 2020 yaitu menjadi Rp472.525,00,-/kapita/bulan dengan rincian adalah garis kemiskinan makan sebesar Rp349.474,00,- atau 73,96% dari total garis kemiskinan pada bulan maret 2021 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp123.051,00,- atau 26,04% dari total garis kemiskinan pada bulan maret 2021. Semakin meningkatnya angka kemiskinan tersebut membuktikan bahwa masalah kemiskinan tidak bisa dianggap sepele dan harus segera diatasi.

Kemiskinan memiliki berbagai definisi tergantung sudut pandang yang di gunakan untuk menilai kemiskinan itu sendiri, namun sebagian besar definisi tersebut mengaitkannya dengan aspek ekonomi. Dari berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan maka akan menghasilkan suatu konsep pemikiran yang bisa disederhanakan. Pertama dari sudut pandang

pengukuran kemiskinan itu sendiri, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup layak. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang tidak didasarkan pada nominal pendapatan, tetapi berdasarkan dari persentase standar tertentu. Kedua yaitu dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang muncul akibat sumber daya yang langka dan tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat yang bukan disebabkan oleh seseorang karena malas bekerja, tetapi karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang pendapatan yang tersedia bagi mereka.



**Tabel 3 Kriteria Orang Tidak Mampu**

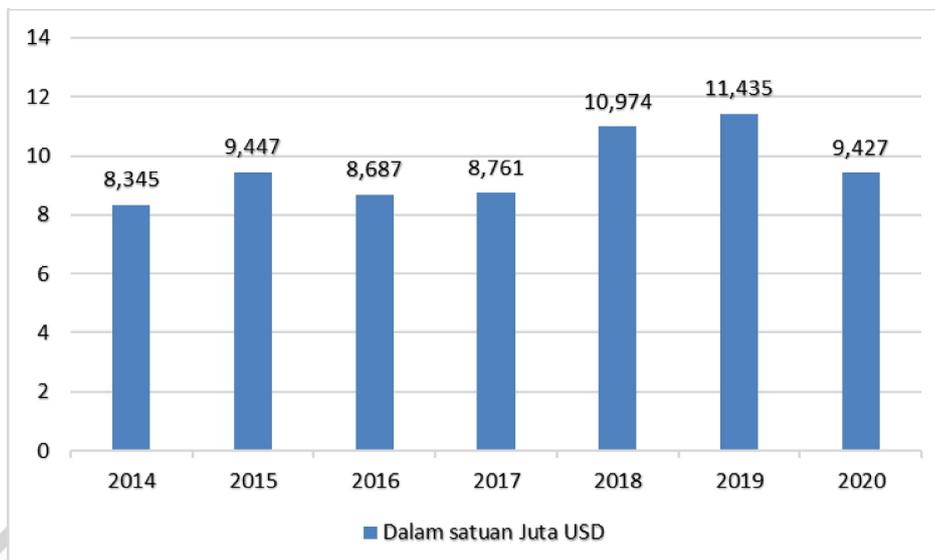
<b>N0</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	Luas lantai rumah	Kurang dari 8 $M^2$	Per orang
2	Jenis lantai rumah	Tanah/bambu/kayu murahan	Per keluarga
3	Jenis dinding rumah	Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plaster.	
4	Rumah	Tidak mempunyai fasilitas MCK/bersama-sama dengan rumah tangga lainnya.	Per keluarga
5	Sumber penerangan di rumah	Tidak menggunakan listrik	Per keluarga
6	Sumber air minum	Sumur/mata air yang tidak terlindung sungai/air hujan	Per keluarga
7	Bahan bakar memasak	Kayu bakar/arang/minyak tanah	Per keluarga
8	Makanan	Mengonsumsi ayam/daging/susu hanya satu kali dalam seminggu	Per keluarga
9	Sandang	Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun	Per orang
10	Pangan	Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari	Per orang
11	Kesehatan	Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas/sarana kesehatan lainnya.	Per orang
12	Pendapatan	Mempunyai luas lahan 500 $M^2$ , nelayan, buruh tani, buruh bangunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000	Per bulan
13	Pendidikan	Tidak sekolah, tidak tamat SD/ sederajat, tamat SD/ sederajat	Kepala keluarga

14	Tabungan	Tidak mempunyai tabungan/barang berharga yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti kendaraan roda dua kredit/non kredit, ternak, prau bermesin, logam mulia atau barang modal lainnya.	Per keluarga
----	----------	---	--------------

Sumber : (KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA No.146 / HUK / 2013, 2013)

Kejadian yang sedang berlangsung pada sebagian besar negara-negara di dunia adalah perpindahan penduduk antar satu negara ke negara lain atau migrasi internasional. Fenomena ini dilandasi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Menurut (Osaki) dalam (Kusreni2, 2017) migrasi penduduk terjadi karena adanya tenaga kerja yang bersifat hakiki (*intrinsic labor*) pada masyarakat industri modern. Tidak berbeda halnya dengan Indonesia, seiring dengan mudahnya mobilitas masyarakat sehingga mendorong peningkatan jumlah migrasi penduduk dari Indonesia ke luar negeri, salah satu tujuan tersebut adalah untuk menjadi pekerja migran. Indonesia sebagai bagian integral dari ekonomi global tidak dapat menghindar dari dinamika tersebut, sehingga pergerakan pekerja migran asal Indonesia yang biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia berdampak signifikan terhadap pendapatan devisa Negara Indonesia.

**Gambar 2 Remitansi Tenaga Kerja Indones 2014–2020 (Juta USD)**



*Sumber : BI DAN BNP2TKI. Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*

Dari gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa tenaga kerja Indonesia padat tahun 2014 memperoleh remitansi sebesar 8,345 juta USD, pada tahun 2015 angka tersebut bertambah 11,67% menjadi 9,447 juta USD, namun pada tahun 2016 remitansi yang di dapat tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan sebesar 8,75% dari tahun sebelumnya menjadi 8,687 juta USA, pada tahun 2017 remitansi yang di dapatkan tenaga kerja Indonesia mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 0,84% yaitu 8,761 juta USD, kemudian pada tahun 2018 remitansi tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 20,17% dari tahun 2017 yaitu 10,974 juta USD, pada tahun 2019 remitansi yang di dapat tenaga kerja Indonesia terus bertambah sebesar 4,20% dari tahun 2018 yaitu menjadi 11,435 juta USD, jumlah tersebut adalah yang tertinggi dari remitansi yang didapat dari tenaga kerja Indonesia selama tujuh tahun terakhir, namun

pata tahun 2020 remitansi yang di dapat tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan sebesar 17,56% dari tahun 2019 menjadi 9,427 juta USD.

**Tabel 4 Negara Dengan Penyumbang Remitansi Terbanyak 2016–2020 (Juta USD)**

NO	Negara	2016 (Juta USD)	2017 (Juta USD)	2018 (Juta USD)	2019 (Juta USD)	2020 (Juta USD)
1	Arab Saudi	2,914	2,556	3,887	3,803	2,990
2	Malaysia	2,516	2,986	3,234	3,252	2,705
3	Taiwan	832	1,087	1,323	1,574	1,406
4	Hong Kong	648	814	1,058	1,229	1,064
5	Singapura	274	327	341	355	284
6	Korea Selatan	181	182	272	323	267

*Sumber : BI dan BNP2TKI. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2020 Negara Arab Saudi menjadi negara penyumbang remitansi terbesar bagi Negara Indonesia, pada tahun yang sama Negara Malaysia juga menjadi penyumbang remitansi untuk Negara Indonesia pada urutan kedua setelah Negara Arab Saudi dan diikuti oleh Negara Taiwan, Negara Hong Kong, Negara Singapura dan Negara Korea Selatan. Pada tahun 2020 terdapat beberapa negara dengan penyumbang remitansi terbesar bagi Negara Indonesia antara lain adalah Negara Arab Saudi yang berjumlah 2,990 juta USD, kemudian selanjutnya adalah Negara Malaysia dengan jumlah 2,705 juta USD, selanjutnya adalah Negara Taiwan dengan jumlah 1,406 juta USD, kemudian Negara Hong Kong dengan jumlah 1,064 juta USD, Negara Singapura dengan jumlah 284 juta USD dan Negara Korea Selatan dengan jumlah 264 juta USD.

Menurut (Solvate) dalam (Kusreni2, 2017) mengemukakan beberapa keuntungan ekonomi dari migrasi internasional antara lain adalah bagi buruh migran nominal pendapatan pada tempat kerja baru lebih tinggi di banding nominal pendapatan yang mereka peroleh di tempat asal mereka, maka melalui nominal pendapatan yang lebih tinggi tersebut pekerja migran akan memperoleh standar kehidupan yang lebih layak. Pekerja migran juga dapat memperbaiki tingkat pendidikan, peluang pekerjaan dan masa depan yang lebih layak bagi keluarga mereka.



**Tabel 5 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Penempatannya 2018–  
2020**

<b>NO</b>	<b>NEGARA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Hong Kong	73.917 (26,06%)	70.840 (25,62%)	53.206 (47,01%)
2	Taiwan	72.373 (25,52%)	79.574 (28,77%)	34.415 (30,41%)
3	Malaysia	90.664 (31,96%)	79.662 (28,81%)	14.630 (12,93%)
4	Singapura	18.324 (6,46%)	19.354 (7,00%)	4.474 (3,95%)
5	Saudi Arabia	5.894 (2,08%)	7.018 (2,54%)	1.793 (1,58%)
6	Brunai Darussalam	5.707 (2,01%)	5.639 (2,04%)	1.202 (1,06%)
7	Poland	102 (0,04%)	430 (0,16%)	798 (0,71%)
8	Japan	458 (0,16%)	486 (0,18%)	749 (0,66%)
9	Korea Selatan	6.905 (2,43%)	6.193 (2,24%)	641 (0,57%)
10	Italy	1.204 (0,42%)	1.349 (0,49%)	411 (0,36%)
11	New Zealand	340 (0,12%)	339 (0,12%)	133 (0,12%)
12	United Arab Emirates	726 (0,26%)	578 (0,21%)	117 (0,10%)
13	Papua New Guinea	132 (0,05%)	1.034 (0,37%)	90 (0,08%)

14	Kuwait	1.172 (0,41%)	782 (0,28%)	74 (0,07%)
15	Maldives	322 (0,11%)	292 (0,11%)	73 (0,06%)
16	Lainnya	5.400 (1,90%)	2.983 (1,08%)	367 (0,32%)
<b>JUMLAH</b>		<b>283.640</b> <b>(100,00%)</b>	<b>276.553</b> <b>(100,00%)</b>	<b>113.173</b> <b>(100,00%)</b>

Sumber :BP2MI.Data Penempatan Dan Perlindungan PMI 2020

Dari data tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 ada beberapa negara yang mendominasi tujuan dari tenaga kerja Indonesia antara lain adalah Negara Hong Kong berjumlah 53.206 jiwa atau 47,01% dari total tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri pada tahun tersebut, selanjutnya adalah Negara Taiwan yang berjumlah 34.415 jiwa atau 30,41% dari total tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada tahun tersebut, selanjutnya adalah Negara Malaysia dengan jumlah tenaga kerja Indonesia 14.630 jiwa atau 12,93% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri pada tahun tersebut, selanjutnya adalah Negara Singapura dengan jumlah tenaga kerja Indonesia 4.474 jiwa atau 3,95% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja Indonesia pada tahun tersebut dan negara Arab Saudi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia 1.793 jiwa atau 1,58% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020.

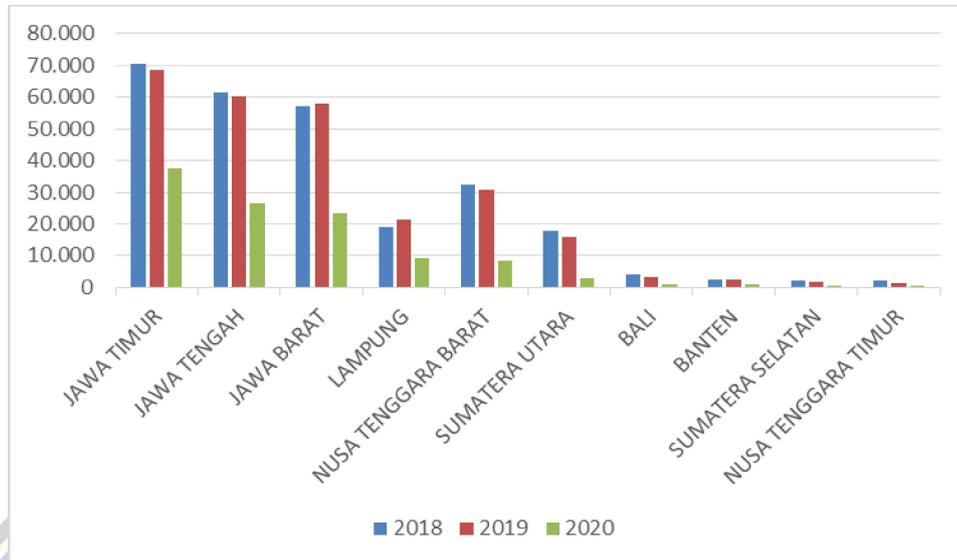
**Tabel 6 Jumlah Dan Persentase Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin 2018–2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Laki-Laki	84.666 (29,85%)	85.316 (30,85%)	22.673 (20,03%)
2	Perempuan	198.974 (70,15%)	191.237 (69,15%)	90.500 (79,97%)
<b>JUMLAH</b>		<b>283.640</b> <b>(100,00%)</b>	<b>276.553</b> <b>(100,00%)</b>	<b>113.173</b> <b>(100,00%)</b>

*Sumber :BP2MI.Data Penempatan Dan Perlindungan PMI 2020*

Dari data tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada tahun 2018 berjumlah 283.640 jiwa dan di dominasi oleh pekerja perempuan yang mencapai 70,15% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja Indonesia di tahun tersebut, pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja dari Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,50% menjadi 276.553 jiwa dan masih di dominasi oleh pekerja perempuan yaitu sebesar 69,15%, penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2020 sebesar 59,08% dari tahun 2019 menjadi 113.173 jiwa dan pada tahun tersebut persentase pekerja perempuan semakin mendominasi yaitu mencapai 79,97% dari total tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

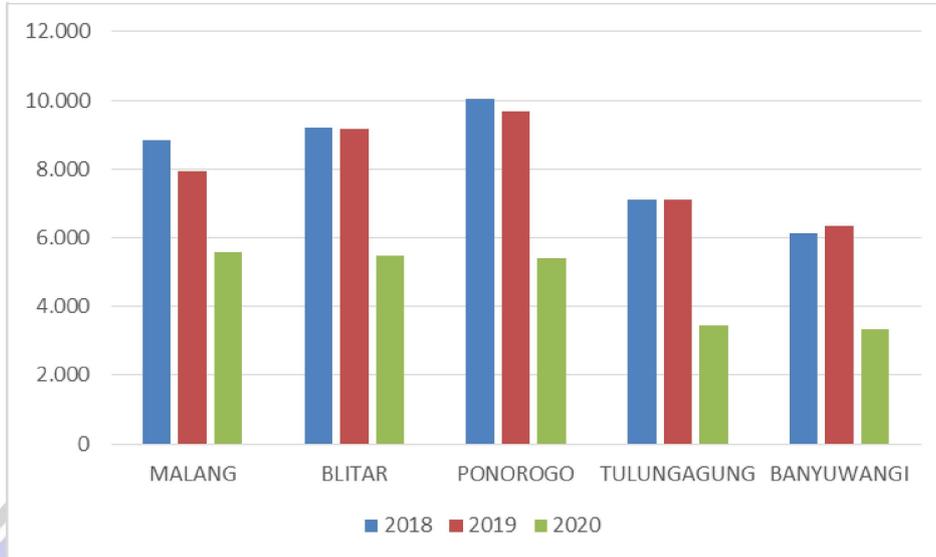
**Gambar 3 Jumlah TKI Berdasarkan Asal Provinsi**



*Sumber : BP2MI. Data Penempatan Dan Perlindungan PMI 2020*

Dari data gambar 3 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia dari 10 provinsi dengan penyumbang tenaga kerja tertinggi di Indonesia di tahun 2020 antara lain adalah Jawa Timur dengan jumlah 37.331 jiwa, Jawa Tengah dengan jumlah 26.419 jiwa, Jawa Barat dengan jumlah 23.246 jiwa, Lampung dengan jumlah 9.192 jiwa, Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 8.261 jiwa, Sumatera Utara dengan jumlah 2.814 jiwa, Bali dengan jumlah 895 jiwa, Banten dengan jumlah 809 jiwa, Sumatera Selatan dengan jumlah 534 jiwa dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 427 jiwa.

**Gambar 4 Jumlah TKI Berdasarkan Asal Kabupaten di Jawa Timur**



*Sumber : BP2MI. Data Penempatan Dan Perlindungan PMI 2020*

Dari data gambar 4 tersebut dapat diketahui bahwa lima kabupaten dengan jumlah tenaga kerja Indonesia terbanyak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 antara lain adalah Kabupaten Malang dengan jumlah 5.600 jiwa, Kabupaten Blitar dengan jumlah 5.471 jiwa, Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 5.397 jiwa, Kabupaten Tulungagung dengan jumlah 3.444 jiwa dan Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah 3.347 jiwa. Pada diagram tersebut Kabupaten Ponorogo menempati urutan ke tiga di Jawa Timur pada tahun 2020, bahkan pada tahun 2018 Kabupaten Ponorogo menempati urutan pertama penyumbang TKI terbanyak di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 10.043 jiwa.

**Tabel 7 Banyaknya TKI Di Kabupaten Ponorogo 2018**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	
1	Sukorejo	160 (2,86%)	351 (6,27%)	511 (9,12%)
2	Babadan	139 (2,48%)	348 (6,21%)	487 (8,69%)
3	Jenangan	139 (2,48%)	307 (5,48%)	446 (7,96%)
4	Jambon	169 (3,02%)	269 (4,80%)	438 (7,82%)
5	Balong	137 (2,45%)	245 (4,37%)	382 (6,82%)
6	Slahung	138 (2,46%)	232 (4,14%)	370 (6,60%)
7	Kauman	129 (2,30%)	208 (3,71%)	337 (6,02%)
8	Pulung	89 (1,59%)	235 (4,19%)	324 (5,78%)
9	Sawoo	131 (2,34%)	139 (2,48%)	270 (4,82%)
10	Bungkal	100 (1,79%)	165 (2,95%)	265 (4,73%)
11	Ponorogo	65 (1,16%)	200 (3,57%)	265 (4,73%)
12	Sampung	48 (0,86%)	170 (3,03%)	218 (3,89%)
13	Siman	51 (0,91%)	156 (2,78%)	207 (3,70%)
14	Sambit	72 (1,29%)	130 (2,32%)	202 (3,61%)
15	Ngrayun	70 (1,25%)	122 (2,18%)	192 (3,43%)
16	Badegan	40 (0,71%)	118 (2,11%)	158 (2,82%)
17	Mlatak	43 (0,77%)	98 (1,75%)	141 (2,52%)
18	Jetis	46 (0,82%)	93 (1,66%)	139 (2,48%)
19	Ngebel	36 (0,64%)	90 (1,61%)	126 (2,25%)
20	Sooko	38 (0,68%)	52 (0,93%)	90 (1,61%)
21	Pudak	11 (0,20%)	23 (0,41%)	34 (0,61%)
<b>Total</b>		<b>1.851 (33,04%)</b>	<b>3.751 (66,96%)</b>	<b>5.602 (100,00%)</b>

Sumber : BPS. Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019

Dari tabel 7 tersebut menunjukkan bahwasanya Kecamatan Sukorejo sebagai penyumbang TKI terbanyak di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 511 jiwa atau

9,12% dari jumlah TKI dari Kabupaten Ponorogo. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo yang berjudul Kecamatan Sukorejo dalam angka 2020, Kecamatan Sukorejo secara geografis terletak di 17 KM ke arah tenggara dari pusat Kota Ponorogo, berada di ketinggian 111 meter sampai 167 meter di atas permukaan laut, memiliki luas wilayah 5.958  $KM^2$ , berpenduduk total penduduk 54.022 jiwa dengan rincian laki-laki 27.787 jiwa dan perempuan 26.235, jiwa mempunyai kepadatan penduduk 857/ $KM^2$ . Masyarakat di Kecamatan Sukorejo mayoritas mempunyai mata pencaharian utama antara lain petani dengan 12.862 jiwa, perdagangan dengan 1.999 jiwa, konstruksi dengan 1.644 jiwa, industri pengolahan dengan 1.289 jiwa.

Ida Bagus Mantra dalam (Bahri, 2017) mengemukakan bahwa tujuan utama dari orang yang melakukan migrasi antar daerah adalah tujuan ekonomi, tujuan ini meningkat sebab didasari adanya ketimpangan ekonomi antara daerah satu dengan lainnya. Dengan kata lain migrasi yang dilakukan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain guna mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik atau memperoleh kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan keluarga dari hasil mempergunakan pendapatan yang peroleh sehingga membuat keluarga merasa aman dan bahagia.

Menurut (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009, 2009) mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan keadaan keluarga yang mempunyai tekad serta ketangguhan dan memiliki keahlian fisik serta materiel untuk hidup mandiri serta meningkatkan diri demi keluarganya agar hidup harmonis dalam tingkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir serta batin. Kesejahteraan atau sejahtera secara umum mempunyai beberapa arti atau pemaknaan. Dalam

pemahaman yang luas kesejahteraan merupakan kondisi dimana setiap individu berada dalam kondisi makmur, sehat dan damai. Namun jika dalam perspektif ekonomi kesejahteraan mempunyai empat variabel yang wajib terpenuhi seluruhnya seperti yang dikemukakan (Nasikun) dalam (Purwanto & Taftazani, 2018) bahwasanya kesejahteraan dapat di lihat dari empat variabel yang wajib terpenuhi antara lain adalah perasa aman, kebebasan, jati diri dan kesejahteraan. Menurut (Kolle) dalam (Purwanto & Taftazani, 2018) kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan, antara lain adalah segi materi, fisik, mental, dan spiritual. Menurut Badan Pusat Statistik indikator untuk melihat kesejahteraan rumah tangga antara lain merupakan tingkatan pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan menyeimbangkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan, tingkatan pendidikan keluarga, tingkatan kesehatan keluarga serta keadaan dan sarana yang dimiliki dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terdapat enam variabel yang dapat dijadikan komponen dalam menilai kesejahteraan individu atau suatu keluarga, antara lain adalah pendidikan (meliputi: angka melek aksara, pendidikan formal yang telah di tempuh, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi penduduk usia sekolah), kesehatan (meliputi: fasilitas kesehatan, tenaga medis, jumlah kematian bayi dan penyebabnya, angka harapan hidup, kejadian penyakit menular (termasuk pengobatannya), gizi (meliputi: asupan gizi dan sumber bahan makanan yang di konsumsi, konsumsi energi dan protein, status gizi anak di bawah 5 tahun), konsumsi dan pengeluaran rumah tangga (meliputi: pengeluaran per kapita, pengeluaran makanan, pengeluaran bukan makanan serta alokasi pengeluaran), ketenagakerjaan (meliputi: jumlah tanggungan kerja, kualifikasi tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja, status

pekerjaan dan kesempatan kerja, jam kerja dan upah pekerja, catatan pendidikan tenaga kerja), perumahan dan lingkungan (termasuk: ketersediaan perumahan dan struktur lingkungan, serta kondisi lingkungan tempat tinggal).

Berdasarkan pemaparan yang telah tertera di atas maka penelitian ini berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Empiris Kecamatan Sukorejo)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh besaran remitansi terhadap kesejahteraan keluarga TKI?
2. Apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan keluarga terhadap kesejahteraan keluarga TKI?
3. Apakah ada pengaruh lama kerja TKI di luar negeri terhadap kesejahteraan keluarga TKI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh besaran remitansi terhadap kesejahteraan keluarga TKI.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pendidikan keluarga kesejahteraan keluarga TKI.
3. Untuk mengetahui pengaruh lama kerja TKI di luar negeri terhadap kesejahteraan keluarga TKI.

## D. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Peneliti

- a) Sebagai salah satu bentuk pengimplementasian bagi peneliti terhadap ilmu-ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.
- b) Sebagai salah satu tugas untuk mendapatkan gelar strata satu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- c) Sebagai penambah pengetahuan serta pengalaman dalam bidang ekonomi, tepatnya yaitu kesejahteraan keluarga TKI.

### 2. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana menguji kemampuan dan pengimplementasian tugas mahasiswa sebagai *agent of change* untuk meningkatkan daya pikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiswa yang didapatkan di bangku perkuliahan dan sebagai salah satu alat untuk tolak ukur antara kehidupan sebenarnya di masyarakat dengan teori-teori yang telah di ajarkan di bangku perkuliahan.

### 3. Bagi Universitas

Sebagai salah satu alat yang bisa dijadikan pertimbangan dan perbandingan untuk pengambilan keputusan dalam memberikan sumbangsih gagasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan juga sebagai sarana menambah koleksi pustaka yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan.